

**RUMUSAN RAPAT KERJA NASIONAL
PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2018
Jakarta, 15 Januari 2018**

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2018 telah dilaksanakan pada Senin, 15 Januari 2018 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta dengan mengundang sebagai peserta kepala dinas lingkup pertanian provinsi seluruh Indonesia dan kepala dinas lingkup pertanian kabupaten/kota di 17 provinsi sentra produksi pangan, Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam), Komandan Resor Militer (Danrem), Komandan Distrik Militer (Dandim) TNI AD, dan pejabat Eselon 1, 2 dan 3 serta Kepala UPT vertikal lingkup Kementerian Pertanian.

Rakernas pada tahun ini mengambil tema **“Mengangkat Kesejahteraan Petani”** dengan tujuan membahas dan memperkuat komitmen para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam rangka: (1) upaya percepatan pelaksanaan kegiatan khususnya terkait pencapaian target produksi pertanian menuju swasembada pangan berkelanjutan; 2) pematapan kegiatan padat karya dan pengentasan kemiskinan bidang pertanian; dan 3) pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan aturan yang berlaku.

Rumusan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Upaya Khusus (Upsus) swasembada pangan yang kita laksanakan bersama sejak tahun 2015 telah berjalan *on the track* yang ditandai dengan peningkatan produksi komoditas strategis sehingga Indonesia tidak mengimpor beras medium, bawang merah dan cabai segar sejak 2016 dan tidak mengimpor jagung untuk pakan ternak di tahun 2017. Indonesia bahkan telah mengekspor beras dan bawang merah dan komoditas lainnya dari perbatasan.
2. Kinerja produksi komoditas strategis nasional pada tahun 2017 tercatat positif dimana terjadi kenaikan produksi padi, jagung dan bawang merah masing-masing sebesar 2,4%; 18,5% dan 3,3% dibandingkan tahun 2016, dan untuk komoditas gula, daging sapi, sawit, dan karet masing-masing meningkat 10,9%; 2,6%; 6,4%; dan 2,3% dibanding 2016.
3. Kinerja positif sektor pertanian pada tiga tahun terakhir telah berdampak pada kesejahteraan petani dimana jumlah rumah tangga petani sejahtera meningkat dari 85,25 persen pada Maret 2014 menjadi 85,87 persen pada Maret 2017.
4. Kementerian Pertanian pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan padat karya (*cash for work*) di 100 kabupaten/kota dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Kegiatan padat karya mencakup cetak sawah, rehab jaringan irigasi tersier, pembangunan embung/dam parit/long storage, pembangunan jalan usaha tani, penangkaran benih/bibit hortikultura dan perkebunan dan pengembangan kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui pemberdayaan petani dan fasilitasi bantuan ternak ayam, itik, kambing/domba, kelinci, bantuan benih/bibit hortikultura dan perkebunan kepada rumah tangga miskin di perdesaan serta bantuan alat dan mesin pertanian kepada petani yang tidak memiliki lahan.
5. Disamping program padat karya dan pengentasan kemiskinan, pada tahun 2018 Kementerian Pertanian fokus memperkuat Upaya Khusus (Upsus) pangan strategis yang mencakup padi, jagung, cabai, bawang merah dan bawang putih guna mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; meningkatkan populasi sapi melalui program Inseminasi Buatan/SIWAB; mengembalikan kejayaan rempah-rempah nasional;

pemanfaatan lahan rawa/lebak untuk budidaya pertanian; serta pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi.

6. Pada tahun 2018 Kementerian Pertanian akan membenahi sistem perbenihan nasional melalui penguatan infrastruktur penelitian dan pengembangan perbenihan untuk benih/bibit hortikultura, perkebunan dan peternakan, penyuluhan dan pemberdayaan petani serta penguatan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat.
7. Pemanfaatan lahan rawa/lebak dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017 yang dilanjutkan di 2018 sebanyak 1,0 juta hektar, dari potensi 10 juta hektar yang tersebar di beberapa provinsi. Kementerian Pertanian telah menyiapkan bantuan 212 unit excavator dari pengadaan tahun 2017 dan ditambah 300 unit excavator pada tahun 2018 untuk pengelolaan lahan rawa/lebak.
8. Pemanfaatan lahan kering/tadah hujan (*rainfed*) dilakukan dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) melalui pembangunan sumber-sumber pengairan seperti embung, *long storage*, dam parit dan lainnya. Dibutuhkan dukungan Kementerian PUPR, Kemendes PDTT, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya termasuk jajaran TNI AD dan penyuluh di lapangan untuk melanjutkan pendampingan dan pengawalan Upsus yang telah berjalan baik selama ini.
9. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan komoditas strategis cabai dan bawang merah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan ekspor dilakukan melalui upaya manajemen tanam yang diiringi dengan dukungan perbenihan dan perlindungan tanaman dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim.
10. Memasuki panen padi yang akan mencapai puncaknya pada Februari-April 2018, Kementerian Pertanian menghimbau pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi jatuhnya harga pada saat panen raya. Dinas pertanian kabupaten bersama jajaran Dandim setempat agar mendorong dan mendukung program Serap Gabah Petani oleh Bulog dengan target Januari-Desember 2018 dapat diserap 3,7 juta ton setara beras.
11. Distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok agar terus dikawal guna menghindari penimbunan oleh para oknum pedagang. Dalam hal ini Kementerian Pertanian mendukung kinerja Tim Satgas Pangan yang dibentuk oleh Kapolri untuk terus bersama-sama melakukan pengawalan dan pemantauan sehingga tidak terjadi gejolak harga yang merugikan di tingkat konsumen.
12. Dinas pertanian lingkup provinsi dan kabupaten/kota agar melaksanakan pengawalan, pendampingan serta pelaporan kegiatan dengan baik mengingat fungsi pemerintah yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membina dan memberdayakan petani.
13. Seluruh Pedum, Juklak dan Juknis kegiatan 2018 yang telah dibagikan ke daerah agar segera ditindaklanjuti dengan Rapat Kerja Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota, sehingga kegiatan-kegiatan 2018 dapat segera dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya para kepala dinas pertanian lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota agar segera menetapkan PPK di daerah dan memfinalkan CP/CL.

Jakarta, Januari 2018

Tim Perumus